

Mekanisme Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal dan Nelayan Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus di TPI Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo)

Oleh:

NINING ANDRI WAHYUNI
NIM.1720802082

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan pertolongan dari orang lain, juga ikut andil dalam menerima dan memberikan kepada orang lain, serta kita saling bermuamalah untuk memenuhi hajat dan kemajuan dalam kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia membutuhkan kerjasama untuk saling menguntungkan satu sama lain. Hal ini tidak terlepas pula tercermin dalam kerjasama yang saling menguntungkan pada sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

Penelitian ini membahas tentang mekanisme bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan fokus pembahasan bagaimana mekanisme bagi hasil yang telah berlangsung selama ini, serta bagaimana keterkaitan tinjauan ekonomi Islam tentang mekanisme bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Pendekatan metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif, sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya dilakukan secara objektif dan melibatkan semua unsur dalam penelitian yang nantinya akan menjadi dokumen personal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan yang berlangsung di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tidak melandaskan ekonomi Islam, yang mana dalam akad Mudhorabah sendiri dijelaskan bahwa antara *shohibul mal* dan *pmudhorib* seharusnya mendapatkan hasil 50:50. Hal ini dikarenakan kebiasaan sistem bagi hasil yang berlangsung di Kecamatan Mayangan ditentukan oleh pemilik kapal yang akan disepakati bersama oleh nelayannya (abk). Dari pendapatan kotor sebesar Rp. 65.000.000 dalam 14 hari berlayar, setidaknya perorang dari 10 nelayan (abk) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.833.00. Besaran pendapatan nelayan yang diperoleh telah menjadi kesepatan bersama meski pemilik kapal telah memotong pendapatan kotor tersebut untuk hal lainnya. Hal ini menjadi ketimpangan atau terdapat unsur *gharar*, dimana ada pihak yang dirugikan yaitu nelayan. Namun, disisi lain nelayan (abk) sering membawa pulang ikan tanpa sepengetahuan pemilik kapal. Dilihat dari tinjauan ekonomi Islam, kerjasama ini tidak men erapkan sistem keadilan dan kejujuran dalam sistem bagi hasil.

Kata Kunci: Mekanisme, Bagi Hasil, Pemilik Kapal dan Nelayan